

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka efisiensi pengelolaan pendidikan, meningkatkan mutu, pemerataan yang ada di satuan pendidikan disebut komite sekolah. Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD No 75 tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school / community based management).

Di dalam otonomi daerah untuk pelaksanaan pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sekolah. Fokus pada desentralisasi kewenangan di tingkat sekolah menjadi model pengelolaan

Menurut Calweii (2005) konsep MBS didefinisikan sebagai “ *the desentralization of authority from the central govermen to the school level* “.

Pemikiran ini sejalan dengan istilah yang dikemukakan oleh Malen, Ogawa dan Kranz disebutkan sebagai berikut :

“School-based management can be viewed conceptually as a formal alteration of governance, as a from desentralization that identifies the indiviual shool as the primary unit of improvemen and relies on the redistribution of decisionmaking authority as thw primary means though which improvemenn might be stimulated and sustained “ (Barera-osorio, et al., 2010: 8)

Pengalihan wewenang pengelolaan sekolah yang merupakan suatu bentuk dari proses desentralisasi yang merupakan perwujudan dari satuan primer

pengembang merupakan definisi dari MBS. Kewenang tersebut terletak pada redistribusi keputusan yang diambil sebagai cara untuk melakukan berbagai macam perubahan. Jadi MBS didefinisikan Manajemen yang menjadikan sekolah mengharuskan mandiri dalam pengambilan keputusan penting dalam sekolah tersebut. Dengan adanya MBS maka seluruh pemangku jabatan dalam lembaga sekolah diantaranya wali mutid, kepala sekolah, guru, dan siswa diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan yang optimal dalam proses pelayanan pendidikan.

Tindakan nyata yang dilakukan oleh sekolah adalah membentuk Komite Sekolah (KS) yang ada pada tiap sekolah. Komite sekolah akan menjadi representatif dari adanya keragaman yang ada, sehingga keberadaan mereka dapat mewakili masyarakat yang ada khususnya wali murid dari lembaga yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut dapat digunakan sebagai jembatan penghubung antara sekolah dengan pihak orang tua siswa.

Agar Komite Sekolah mampu melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai: (a) pemberi pertimbangan (*advisory*); (b) pendukung (*supporting*); (c) pengontrol (*controlling*); dan (d) mediator, maka segala potensi yang ada pada kepengurusan Komite Sekolah harus diberdayakan secara maksimal. Tiga hal dalam upaya peningkatan peran komite sekolah yaitu: (1) Peningkatan kemampuan berorganisasi (2) Penguatan kelembagaan Komite Sekolah); dan (3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah (Depdiknas, 2006).

Adanya komite sekolah merupakan perwujudan dari otonomi sekolah. Sehingga pemerintahan pada umumnya dan penyelenggaraan pendidikan pada khususnya harus melibatkan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan melahirkan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *school-based management* (SBM).

Adapun maksud dibentuknya komite sekolah menurut Depdiknas agar ada organisasi masyarakat yang berkomitmen dan loyal serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah (Depdiknas, 2006:15). Keberadaan komite sekolah yang terletak di dalam masyarakat dan kalangan swasta sehingga sangatlah dirasa strategis dalam menjembatani peran komite sekolah terhadap berbagai kepentingan masyarakat dalam kontribusinya terhadap sekolah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan komite sekolah sudah menunjukkan kerja nyata untuk sekolah-sekolah yang sudah maju. Untuk sekolah-sekolah unggulan peranan komite sudah tampak nyata dengan adanya Ikatan Orang Tua Murid (IOM) pada setiap kelas. IOM ini mendukung program pembelajaran baik ekstra maupun intrakurikuler di sekolah tersebut.

Kiprah komite sekolah yang sudah maju tersebut perlu dijadikan panutan bagi komite-komite sekolah yang lain. Peran komite sekolah yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di masing-masing sekolah.

Berbeda dengan kenyataan yang berada di lapangan, ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang keberadaan komite sekolahnya belum berfungsi secara optimal. Hal itu disebabkan karena pengurus komite kebanyakan orang-

orang yang kurang peduli terhadap pendidikan, wawasan organisasi yang kurang, serta anggapan masyarakat bahwa menjadi pengurus komite sekolah itu hanya menambah beban kerja saja. Kondisi pengurus komite yang seperti itu menyebabkan komite sekolah kurang dalam menempatkan fungsi dan perannya.

Keadaan komite yang kurang berperan tersebut banyak terjadi di daerah yang dalam kategori masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Jika kondisi ini terjadi di suatu sekolah, maka keberadaan komite sekolah seolah-olah menjadikan kesempatan untuk mendapatkan masukan finansial saja. Sehingga diperlukan langkah yang intensif untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa menjadi pengurus komite merupakan pengabdian untuk kemajuan peserta didik.

Pola pikir masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam komite, menunjukkan bahwa masyarakat tersebut tidak ingin menerima pekerjaan tambahan selain rutinitas pekerjaan kesehariannya. Menjadi pengurus komite dianggap sebagai beban, baik beban tenaga maupun beban pikiran, sehingga guru dan kepala sekolah harus berfikir ekstra keras untuk memikirkan segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan sekolah.

Kondisi tersebut ternyata berlaku bagi komite sekolah di DN Campurasri 1 Kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi. Pengurus komite tidak menunjukkan kinerja yang proaktif dengan sekolah. Terkesan bahwa komite sekolah itu hanya sebagai “tukang stempel” terhadap program-program sekolah. Pengurus komite sekolah kurang tanggap terhadap aspirasi-aspirasi

dari masyarakat. Kepengurusan komite yang terkesan hanya sebagai simbol tentang keberadaan komite sekolah. Peranannya yang sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator kurang berfungsi secara optimal.

SDN Campurasri 1 yang berada di kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi termasuk sekolah unggul, hal ini terbukti dari banyaknya prestasi yang berhasil diraih oleh sekolah tersebut baik bidang akademis maupun non akademis. Seringkali SDN Campurasri mengirimkan siswa-siswinya ke ajang lomba tingkat propinsi yang merupakan hasil seleksi di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu SDN Campurasri menjadi rujukan dari siswa-siswa yang berasal dari luar desa Campurasri. Perilaku siswa-siswi yang sangat ramah dan sopan terhadap tamu-tamu yang datang di sekolah tersebut menandakan bila karakter dari siswa tersebut sangatlah baik.

Dengan melihat kondisi seperti di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di SD Negeri Campurasri 1 Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2017-2018”.

B. Rumusan Masalah

Fokus :

Bagaimana peran komite dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SDN Campurasri 1 kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?

Subfokus :

1. Bagaimana peranan komite dalam perencanaan penyusunan anggaran di SDN Campurasri 1 ?
2. Bagaimana peran komite dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan layanan pendidikan di SDN Campurasri 1 ?
3. Bagaimana hambatan dan peluang dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SDN Campurasri 1 ?

C. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan fokus dan subfokus permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mendiskripsikan peranan komite dalam perencanaan penyusunan anggaran di SDN Campurasri 1.
2. Mendiskripsikan peran komite dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan layanan pendidikan di SDN Campurasri 1
3. Mendiskripsikan hambatan dan peluang dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SDN Campurasri 1

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mendiskripsikan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SD 1 Campurasri Kabupaten Ngawi

2. Manfaat praktis

a. Bagi Sekolah :

- 1) Mendapatkan masukan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan

sekolah.

2) Mempererat hubungan silaturahmi dengan komite sekolah.

b Bagi wali murid :

1) Mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan pelayanan mutu pendidikan.

2) Mengetahui keterlibatan komite dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan

c Bagi Peneliti :

1) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Manajemen Pendidikan.

2) Mendapatkan pengalaman dalam usaha meningkatkan mutu layanan pendidikan.